

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A, Bryan., 1999, Garner, Black Law's Dictionary, West Group.St. Paul,
- Algra, N.E., 1974, Black Law's Dictionary, Tjeenk Willink, Groningen.
- Ali, Achmad., 2010, Menguk Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Anatami, Darwis., 2021, Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Arikunto, Soeharsimi., 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arto, Mukti., 2004, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Burhan Ashafa., 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja., 2007, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher, Jakarta.
- Fuady, Munir., 2008, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, Elyta Ras., 2018, Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Ali., 1996, KUHP dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hariri, Wawan Muhwan., 2011, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam, CV Pustaka Seria, Bandung.
- Hartini, Rahayu., 2009, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase, Kencana, Jakarta.
- HS, Salim., 2013, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jan, Tjia Siau., 2013, Pengadilan Pajak : Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak, Akumuni, Bandung.
- Jono., 2013, Hukum Kepailitan, Penerbit Sinar Grafika.

- Lontoh, Rudy, et. al, 2001, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Edisi Pertama, Alumni, Bandung,
- Manan, Bagir., 2009, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Marzuki, Peter Mahmud., 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nasir, Muhammad, 2005, Hukum Acara Perdata, Djambatan, Jakarta,
- Nating, Imran., 2002, Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nugraha, Parada, 2021, Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penerbit Insania, Cirebon.
- Rasaid, M. Nur, 2003, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta
- Rifai, Ahmad., 2010, Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sinaga, Syamsudin M., 2012, Hukum Kepailitan Indonesia, PT. Tanusa, Jakarta
- Situmorang, Viktor M. dan Hendri Soekarso., 1993, Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji., 2006, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta.
- Subekti., 2004, Aneka Perjanjian, Cetakan ke XI, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti., 2005, Kamus Hukum, Cetakan ke 16, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subhan, M. Hadi., 2001, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sulistiowati, 2013, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta,

Syahdeini, Sutan Remy., 2010, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan, edisi keempat, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Usman, Rachmadi., 2004, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wijayanta, Tata dan Muhammad Bagas AH., 2021, Cross Border Insolvency, Kerjasama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan : Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan, UGM Press, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata., 2015, Undang-Undang dan Praktik Kepailitan : Perbandingan Indonesia dan Malaysia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja., 1999, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **Jurnal :**

Agustini, Reny, dan Ariawan, 2021, “Analisis Kepastian Hukum Perorangan yang Melepaskan Hak Istimewa dan Dimohonkan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga Jkt.Pst)”, Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, Vol. 4 No. 2, hlm. 188-208.

Agustinus, Lumiere Rejeki, Nyulistiowati Suryanti dan Ema Rahmawati, 2023, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX-2021 tentang Memperbolehkan Upaya Hukum Kasasi Terhadap PKPU”, Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Arka Institute, Bandung, Vol. 1 No. 12, hlm. 1485-1495.

Akyas, Mohamad, 2022, “Eksekusi Lelang Oleh Kreditor Separatis Pada Masa Perdamaian Dalam PKPU Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, ACTA DIURNAL, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Vol. 5 No. 2, hlm. 303-315, [30/06/2022]<https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.809> [03/06/2023].

Ariawan, I Gusti Ketut, 2013, “Metode Penelitian Hukum Normatif”, Kertha Widya Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Bali. hlm. 21-30.

Astuti, Yossi, dan Beta Pandu Yunita, 2022, “Pelaksanaan Lelang Aset Debitor Dalam Upaya Penyelesaian Pembayaran Hutangnya Kepada Kreditor”, Datin Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo, Jambi, Vol. 3 No. 2, hlm. 114-144.

- Baginda, Izan Virginia, 2020, “Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis Terhadap Harta Debitur Pailit Insolven”, *Lex Privatum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. VIII, No. 1, hal. 97-105.
- Chandra, Nanda dan M. Farhan Fedhitama, 2021, “Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya Concursus Creditorium Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang”, *Journal of Economic and Business Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Vol. 1 No. 2, hlm. 1-11.
- Cindarbumi, Berlian Pramesthi dan Aam Suryamah, 2022, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal USM Law Review*, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Vol. 5 Tahun 2022, hlm. 508-522.
- Damlah, Judita, 2017, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. VI no. 2, hlm. 91-98, [27/03/2017], <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15348>, [11/06/2023].
- Disemadi, Hari Sutra, dan Danial Gomes, 2021, “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Vol. 9 No. 1, [14/11/2021], <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>, [26/06/2023], hlm. 123-134.
- Frija, Rahman, Etty Susilowati dan Hendro Saptono, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*, *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 5 No. 3, hlm. 1-18
- Guntara, Deny, Farhan Asyhadi, dan Izni Nur, 2021, “Analisis Yuridis Keadaan Insolvensi Debitor Pailit PT. Mandala Airlines Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kembali Kewajiban Utang (Studi Putusan Nomor : 46/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, *RECHTSCIENTIA Jurnal Mahasiswa Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Vol. 1 No. 1, hlm.1-18 [01/03/2021] <https://doi.org/10.36805/rechtscientia.v1i1.32> [05/06/2023].
- Halimuddin, Mohammad Umar, Ramlani Lina Sinaulan dan Ismail, 2023, “Kepastian Hukum Penjamin Perorangan (Borgtocht) dalam Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Prosiding Ideas Publishing*, Prosiding Ideas, hlm. 69-76.

- Haq, M. Bagas dan Tata Wijayanta 2020, "Recognition of Foreign Insolvency Proceedings : A Comparative Study between the Laws of Indonesia and South Korea", International Journal of Innovation, Creativity dan Change, Primrose Hall Publishing Group, Sydney, Vol. 14, Issue 12, hlm. 715-729.
- Hariyadi, Hasdi, 2020, "Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas.", SIGn Jurnal Hukum, CV. Sosial Politik Genius, Makassar, Vol. 1, No. 2, hlm. 119-135, [24/03/2020], <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61>, [09/04/2023].
- Harsono, Ivan dan Paramita Prananingtyas., 2019, "Analisis terhadap Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer", Notarius, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol 12, No.2, hlm. 1067-1088, [28/12/2019], <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/2915>, [10/04/2023].
- Irianto, Catur, 2015, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, Vol. 4, No. 3, Pekanbaru, hlm. 399-418. [25/02/2015], <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.399-418>. [tgl/bln/tahun, [10/04/2023]
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019," Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 01 No. 01 hlm. 13-22.
- Kamahayani, Monitacia dan Suyud Margono, 2020, "Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT. Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)", Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, Volume 3 Nomor 1, hlm. 71-91 [12/08/2020] <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i1.8892> [10/06/2023].
- Kartoningrat, R. Besse, Peter M. Marzuki dan M. Hadi Shubhan, 2021, "Prinsip Independensi dan Pertanggungjawaban Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", Jurnal RechtsIdee, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur, Vol.16 No. 1, hlm. 437-64.
- Kemala Atika Hayati, 2016, "Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", USU Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Vol 4 No. 1, hlm. 116-126.

- Kornelis, Yudi dan Florianus Yudhi Priyo, 2020, "Implementasi Restrukturisasi Dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia", Jurnal Selat, Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Vol. 7 No. 2, hlm. 237-277 [10/10/2020] [https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/1739\[03/06/2023\]](https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/1739[03/06/2023]).
- Mantili, Rai, 2020, "Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata, Adhaper, Vol. 6 No. 2, hlm. 21-38.
- Muqaddas, Busyro, 2002, "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 20 No. 9, hlm. 18-31.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, M. Yasir, 2021, Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Scholar Center, Banjarmasin, hlm. 1-20 [17/01/2021] [https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14\[30/05/2023\]](https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14[30/05/2023]).
- Ondang, Quantri H., 2017, "Tugas dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004" Lex et Societatis, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. V No. 7, hlm. 31-37 [12/05/2017] [https://doi.org/10.35796/les.v5i7.18086\[05/07/2023\]](https://doi.org/10.35796/les.v5i7.18086[05/07/2023]).
- Pohan, Nur Elfira Nirmala, 2016, "Analisa Hukum Atas Kedudukan Kreditur Lain Dalam Upaya Hukum Kasasi Pada Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Tiga Putusan Mahkamah Agung), Premise Law Jurnal, Universitas Sumatera Utara, Medan, Vol. 8, hlm. 1-17.
- Prayogo, R. Tony, 2016, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Vol. 13 No. 2, hlm. 191-201.
- Putriyanti, Emma Defiana dan Tata Wjayanta, 2010, "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 22 No. 3, hlm. 482-497. [17/03/2015], [https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16240,\[11/04/2023\]](https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16240,[11/04/2023]).
- Rahayu, Nia dan Anom Pemayun, 2018, "Analisa Yuridis Terhadap Pengaturan Debt Collection Principle Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor



59/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt.Pst”, Kertga Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Vol. 6 No. 3, hlm 1-15.

Rahmadiyanti, Rindy Ayu, 2015, “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Notarius, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Edisi 08 Nomor 2, hlm.252-273.

Raisa, Amanda, Avira Rizkiana Yuniar dan Anita Gladina Ayu, 2020, “Kelemahan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit”, Jurnal Hukum Magnum Opus, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Vol. 3 No. 2, hlm. 216.

Rochmawanto, Munif, 2015, “Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan”, Jurnal Independent, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, Lamongan, Vol. 3 No. 2, hlm. 25-35.

Siahaan, Bakti, 2008, “Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas”, Pranata Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Volume 3 Nomor 1, hlm. 63-75.

Sibli, Nurlita, Ronny A. dan Deasy Sodikromo, 2023, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit”, Lex Et Societatis, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. XI Issue 1, hlm. 5-19.

Simalango, Maruli, 2017, “Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Syiar Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Vol. 15 No. 1, hlm. 53-64.

Sinaga, Niru Anita dan Nunuk Sulisrudatin, 2018, “Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Vol. 7 No. 1, hlm. 158-173.

Slamet, Sri Redjeki, 2016, “Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor”, Forum Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Vol. 13 No. 1, hlm. 52-59.

Stanly, Vincent dan Hanafi Tanawijaya, 2022, “Kedudukan Kreditor Konkuren yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Putusan No. 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung No. : 963 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)”, Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, Vol. 5 No. 2, hlm. 380-402, [18/01/2023]

<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/21827>  
[03/06/2023].

- Tan, David, 2021, "Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", NUSANTARA Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Internasional Batam Indonesia, Batam, Vol. 8 No. 8, hlm. 2463-2478.
- Tendean, Brando Yohanes, 2017, "Akibat Hukum Tentang Debitur Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", Lex Privatu, , Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. V no. 3 hlm. 135-142 [03/05/2017]<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15868> [10/06/2023].
- Triantini, Ni Nyoman Disna dan Ngurah Dharma Laksana, 2020, "Tanggung Jawan Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas", Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Vol. 8 No. 6, hlm. 954-966.
- Trisanda, Sheva dan Tata Wijayanta, 2022, "Eksistensi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Pengurus dan Pemberes Harta Pailit", Jurnal Privat Law, Departemen Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 10, No. 3, hlm. 434-446.
- Wantu, Fence M., 2012, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 12 No. 3, hlm. 479-489.
- Wijayanta, Tata, 2014, "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 26 No. 1, hlm. 1-13. [17/03/2015], <https://doi.org/10.22146/jmh.16063>, [09/04/2023].
- , Tata, 2014, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.", Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Vol. 14 No. 2, hlm. 216-226, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>, [13/04/2023].
- , Tata, 2018, Deadline Settlement of Petition For Declaration of Bankruptcy Before The Commercial Court and The Legal Consequences According to Law Number 37 of 2004 On Bankruptcy and Suspension Of Debt Payment Obligations, Yustisia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol 2 No 3, hlm. 519-533.
- Yohanes Alexander Kenting dan Hizkia Dapot Parulian, 2022, "Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Alethea, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Salatiga, Vol. 5 No. 2, hlm. 91-110.

Zahriyah, Yuhanidz, 2022, “Analisis Putusan di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara Judex Facti dan Judex Juris), Jurnal Pro Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gresik, Gresik, Vol. 11 No. 2, hlm. 267-281, [27/09/2022], <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1774>, [05/07/2023].

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* (Stb) 1847-23).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

### **Putusan Pengadilan :**

Citi Bank NA. vs Silastri Samsi, Nomor 992K/Pdt/1995, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 31 Oktober 1997

PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. vs PT. Plaza Adika Lestari, Nomor : 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

### **Laporan Penelitian:**

Monica Margaretha Napitupulu, 2015, Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Corporate Guarantor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tahun 2014), *Skripsi*, Tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Sriwijastuti, 2010, “Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitor Terhadap Para Kreditor (Studi Kasus pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Ullistiya, Dina, 2020, Bank Tanah : Konsep dan Prospek Penerapannya di Indonesia, *Skripsi*, Tidak dipublikasikan, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yohanes Alexander Kenting, 2022, Problematika Hukum Pengajuan Seluruh Tagihan Oleh Kreditor Separatis Secara Bersamaan Kepada Debitor dan Perusahaan Penjamin (Dalam PKPU), *Skripsi*, Tidak dipublikasikan,

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya  
Wacana, Salatiga.

### **Website**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, [28/10/2016],  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi/>, [18 /04/2023]

Kamus Besar Bahasa Indonesia [28/10/2016],  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/damai/>, [24/03/2023]

### **Wawancara:**

Hardiansyah, 2023, Proses PKPU dan Pailit PT.PAL, *Wawancara*, Jakarta, 12 Juli.

Imran Nating, 2023, Peran Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit dan Kepastian  
Hukum Pembayaran Terhadap Kreditor, *Wawancara*, Jakarta, 18 Juli.

Jimmy Simanjuntak, 2023, Permasalahan Hukum Dalam Pailitnya PT.PAL,  
*Wawancara*, Jakarta, 7 Juli.